
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP DEMOKRASI PANCASILA

M. Syafiq Jain¹, Laurenchius Irvan Freddy Marbun², Kevin Nuansa Aghita Sembiring³, Indry Alem Nurieka⁴, Hairul Amren⁵,
Politeknik Penerbangan Medan, Medan
e-mail: syafiqjain03@gmail.com

Abstract: *Various aspects of life, including Pancasila democracy in Indonesia, have been greatly influenced by advances in information and communication technology, especially social media. Social media is an important tool for disseminating information, shaping public opinion, and increasing citizen involvement in the democratic process. The aim of this research is to see how social media influences the 10 pillars of Pancasila democracy, with an emphasis on elements such as transparency, participation and accountability. This study uses literature and content analysis from various social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram. The research results show that social media can help strengthen Pancasila democracy by providing a more open and inclusive platform where people can express their aspirations and criticize government policies. On the other hand, social media can also cause problems, such as polarization of society and the spread of misinformation (hoaxes). In conclusion, social media is very important to strengthen the pillars of Pancasila democracy. However, to ensure the influence of social media remains positive and constructive, issues such as polarization and the spread of inaccurate information must be addressed.*

Keywords: *Social Media, Pancasila, Society*

Abstrak: Berbagai aspek kehidupan, termasuk demokrasi Pancasila di Indonesia, telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial. Media sosial adalah alat penting untuk menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana media sosial memengaruhi 10 pilar demokrasi Pancasila, dengan penekanan pada elemen seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Studi ini menggunakan literatur dan analisis konten dari berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat membantu memperkuat demokrasi Pancasila dengan menyediakan platform yang lebih terbuka dan inklusif di mana orang dapat menyampaikan aspirasi mereka dan mengkritik kebijakan pemerintah. Sebaliknya, media sosial juga dapat menyebabkan masalah seperti polarisasi masyarakat dan penyebaran informasi palsu. Sebagai kesimpulan, media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Namun, masalah seperti polarisasi dan penyebaran informasi yang salah harus diatasi untuk memastikan pengaruh media sosial tetap positif dan konstruktif.

Kata kunci: Media Social, Pancasila, Masyarakat

PENDAHULUAN

Teknologi dan ilmu pengetahuan terus berkembang dengan cepat seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini terutama terlihat di bidang teknologi

informasi dan komunikasi, yang telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Hampir semua aspek kehidupan manusia sekarang menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi. Ini termasuk di tempat kerja, sekolah, dan pemerintahan. Oleh karena itu, media komunikasi telah menjadi sangat penting untuk aktivitas manusia dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Hal ini semakin didukung dengan munculnya media berbasis internet, seperti platform media sosial seperti Instagram dan Facebook, yang memungkinkan orang untuk dengan mudah mengakses berbagai jenis informasi dari mana pun di dunia melalui internet (Kholisoh et al., 2024).

Media sosial menunjukkan pesatnya kemajuan teknologi di seluruh dunia. Pada awalnya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan eksistensi diri, media sosial sekarang juga berkontribusi pada dinamika politik suatu negara (Latifah & Najicha, 2022). Menurut Firmstone & Soleman, media sosial adalah salah satu komponen sistem demokrasi yang telah mengubah peran warga negara dalam tata kelola pemerintahan, karena dianggap lebih netral dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara. Masyarakat saat ini semakin akrab dengan teknologi, dan tren untuk menyampaikan aspirasi melalui media sosial semakin meningkat. Pemerintah harus fleksibel dan responsif dalam situasi ini. Karena aspirasi masyarakat memiliki kekuatan tertinggi dalam pemerintahan, aspirasi masyarakat sangat berpengaruh dalam demokrasi. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara Pancasila, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini termasuk keadilan sosial, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Dalam sistem demokrasi ini, setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Media sosial, dengan segala kemudahannya dalam menyebarkan informasi dan pandangan, berperan penting dalam mendukung kebebasan berekspresi ini. Namun, dibalik kemudahan dan kebebasan yang ditawarkan oleh media

sosial, terdapat tantangan dan risiko yang tidak bisa diabaikan. Informasi yang disebarkan melalui media sosial sering kali tidak terverifikasi, sehingga rawan terjadi penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu kerukunan dan persatuan bangsa. Selain itu, anonimitas di dunia maya juga sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan fitnah dan provokasi yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penggunaan media sosial dalam konteks demokrasi Pancasila harus dikelola dengan baik agar kebebasan berekspresi yang ada tetap selaras dengan tanggung jawab sosial. Di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sarana efektif untuk menggalang solidaritas sosial, menyebarkan informasi positif, dan menggerakkan aksi-aksi sosial yang konstruktif. Dengan demikian, penggunaan media sosial dalam konteks demokrasi Pancasila harus dikelola dengan baik agar kebebasan berekspresi yang ada tetap selaras dengan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan paparan yang disampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengidentifikasi lebih dalam mengenai peran media sosial dalam demokrasi Pancasila yang nantinya dapat berguna sebagai pengetahuan ilmiah tentang media sosial dalam demokrasi Pancasila.

A. Definisi Media Sosial

Mandibergh mendefinisikan media sosial sebagai sebuah platform yang memungkinkan orang untuk berkolaborasi dalam menciptakan konten yang dibuat oleh pengguna. Sementara itu, Boyd mendeskripsikan media sosial sebagai seperangkat perangkat lunak yang memfasilitasi berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan berkolaborasi di antara individu atau komunitas. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat berbasis internet, atau media online, yang memfasilitasi interaksi sosial, komunikasi, kerja sama, dan berbagi informasi di antara para pengguna.

Definisi Demokrasi

Istilah "demokrasi" secara etimologis berasal dari kata Yunani "demokratia", yang diterjemahkan menjadi "pemerintahan rakyat". Kata ini terdiri dari dua istilah Yunani: "demos", yang berarti rakyat, dan "kratos", yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, "Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." (Kusrini et al., 2023).

Definisi Demokrasi Pancasila

Menurut Rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila adalah kerangka kerja yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan ketatanegaraan bagi seluruh warga negara Republik Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kerangka kerja ini berlaku bagi organisasi kekuatan sosial dan politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, serta lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

Demokrasi Pancasila mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Demokrasi Pancasila memastikan bahwa rakyat terlibat dalam bidang-bidang ini sehingga mereka dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, konstitusi mengatur konsep bahwa "populisme" adalah bagian dari demokrasi, yang didefinisikan sebagai partisipasi atau intervensi tanpa partisipasi publik (S et al., 2017).

Pilar – Pilar Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila terdiri dari beberapa prinsip, termasuk kebebasan dan kesetaraan, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, para pendiri negara telah menetapkan sepuluh pilar demokrasi, yang meliputi:

1. Demokrasi Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Demokrasi Dengan Kecerdasan

3. Demokrasi Yang Berkedaulatan Rakyat
4. Demokrasi Dengan Rule Of Law
5. Demokrasi Dengan Pembagian Kekuasaan Negara
6. Demokrasi Dengan HAM
7. Demokrasi Dengan Pengadilan Yang Merdeka
8. Demokrasi Dengan Otonomi Daerah
9. Demokrasi Dengan Kemakmuran
10. Demokrasi Dengan Berkeadilan Sosial

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan study literature. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman proses dan makna yang tidak diuji atau dikuantifikasi dengan data deskriptif. Pengamatan, pengalaman, dan narasi atau laporan deskriptif digunakan untuk menggambarkan peristiwa. Jenis penelitian ini dicirikan oleh latar alamiah atau dunia nyata, yang menekankan kualitas fenomena yang terjadi di lapangan. Metode penelitian literatur mencakup membaca, mencatat, dan mengolah sumber penelitian. Penelitian ini memahami penelitian sebelumnya tentang demokrasi di Indonesia melalui analisis isi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Ini melibatkan mendokumentasikan bahan penelitian yang diperlukan, termasuk beberapa penelitian sebelumnya dan buku-buku tentang demokrasi di Indonesia. Kemudian dilakukan analisis dan sampai pada kesimpulan. (Komidar, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial menjadi sangat penting di era globalisasi saat ini untuk mendukung berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam politik untuk mendukung demokrasi. Media sosial berfungsi sebagai ruang publik di mana masyarakat

dapat menyampaikan aspirasi mereka, termasuk pendapat, saran, dan kritik terhadap jalannya sistem demokrasi. Partisipasi merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang efektif.

Media sosial juga berfungsi untuk melihat kinerja dan tindakan pemerintah (fungsi pengawasan) sebagai informasi publik yang dapat diketahui oleh masyarakat (Nurgiansah, 2020). Oleh karena itu, masyarakat dapat dengan bebas mengkritik pemerintah melalui media sosial jika mereka percaya bahwa pemerintah tidak melakukan yang cukup. Dengan pertumbuhan pesat, platform digital berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan warga negara. Mekanisme sederhana ini memungkinkan pengguna media sosial untuk memperoleh informasi dan menyuarakan kritik atau dukungan terhadap kebijakan publik.

Pelayanan publik harus transparan dan tepat waktu, tanpa mengabaikan tanggung jawab pelaksanaannya. Media sosial menjadi alat untuk berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dan keputusan dapat berdampak positif pada kepentingan bersama. Selain itu, media sosial mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengawasi kebijakan dan layanan pemerintah.

Tidak diragukan lagi bahwa penggunaan media sosial memengaruhi pelaksanaan demokrasi, baik secara positif maupun negatif. Penyebaran hoaks adalah salah satu efek negatif yang cukup signifikan. Hoaks adalah informasi palsu yang disajikan seolah-olah benar. Pembuat konten hoaks biasanya didorong oleh berbagai alasan, seperti alasan ekonomi dan politik, serta keinginan untuk mendapatkan pengakuan secara online. Berita bohong, ujaran kebencian berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), provokasi, pemutarbalikan fakta, terorisme, dan konten lainnya yang merugikan adalah beberapa bentuk hoaks ini. Hoaks saat ini tersebar luas di media sosial, terutama yang berkaitan dengan masalah politik.

Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Surabaya,

Adven Sarbani, memperingatkan bahwa menyebarkan berita atau informasi palsu sangat berbahaya bagi masyarakat dan bangsa. Ujaran kebencian dan masalah SARA sangat berbahaya jika disebarkan melalui informasi palsu, terutama menjelang pemilihan 2024. Berita palsu mungkin tidak berbahaya jika diabaikan, tetapi menyebarkannya berulang kali dapat membuatnya terlihat benar. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus memperhatikan informasi di media sosial agar kita tidak menjadi korban hoaks. Agar tidak tertipu oleh berita palsu, masyarakat harus aktif menyaring informasi yang mereka temui. Dalam literature yang telah dikaji menyatakan bahwa penyalahgunaan media sosial dapat mengancam demokrasi Indonesia. Informasi palsu dan kemudahan orang untuk mempercayainya dapat mengubah kepribadian seseorang secara bertahap. Sekarang, kohesi sosial di seluruh dunia diancam oleh penyebaran hoaks yang luas. Hoaks memiliki kemampuan untuk menimbulkan permusuhan dan perpecahan di masyarakat, yang menunjukkan bahwa mereka juga dapat merusak persatuan nasional. Untuk itu, kebijakan seperti UU ITE harus dibuat untuk mengatur dan membatasi penggunaan media sosial dalam pelaksanaan demokrasi secara khusus agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi pancasila.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji peran media sosial dalam Demokrasi Pancasila dengan fokus pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan kajian teori dan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan utama dapat diambil:

Kebebasan Berekspresi di Media Sosial: Media sosial memberikan platform yang luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan berbagi informasi. Kebebasan berekspresi ini penting dalam mendukung partisipasi

politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Demokrasi Pancasila.

Tanggung Jawab Sosial di Media Sosial: Meskipun kebebasan berekspresi penting, tanggung jawab sosial pengguna media sosial sangat krusial untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya. Tanggung jawab sosial membantu menjaga harmoni dan keadilan sosial dalam masyarakat, yang merupakan nilai-nilai inti dalam Pancasila.

Interaksi Kebebasan Berekspreasi dan Tanggung Jawab Sosial: Ada dinamika kompleks antara kebebasan berekspreasi dan tanggung jawab sosial di media sosial. Kebebasan berekspreasi yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab sosial dapat merusak integritas demokrasi dan harmoni sosial. Sebaliknya, kebebasan berekspreasi yang bertanggung jawab dapat mendukung proses demokrasi yang sehat dan inklusif.

Pengaruh Media Sosial terhadap Demokrasi Pancasila: Media sosial memiliki potensi untuk meningkatkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila dengan meningkatkan partisipasi publik dan meningkatkan transparansi pemerintah. Di sisi lain, penyalahgunaan media sosial memiliki potensi untuk merusak Demokrasi Pancasila dengan menyebarkan informasi yang salah dan mendorong polarisasi sosial.

Regulasi dan Kebijakan: Untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial di media sosial, penegakan hukum yang kuat dan tepat sangat penting. Regulasi yang adil dapat mencegah penyalahgunaan media sosial tanpa melanggar hak dasar orang untuk bebas berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, D. (2022). Teknik

Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology: Literature Review. 1(2), 85–114.

Hidayah, Y., Ulfah, R. A., & Ulfah, N. (2023). Membangun Demokrasi Sehat dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. *ASANKA : Journal of Social Science and Education*, 4(2), 137–146. <https://doi.org/10.21154/asanka.v4i2.4813>

Kholisoh, M., Nurkhaeni, T., Ningrum, S., & Fitriani, I. (2024). Peran Media Sosial Dalam Demokrasi Masa Kini. *E-Journal Malanda*, 1(1), 1–2.

Kusrini, E., Munawaroh, A., & Maulia, S. T. (2023). Pengaruh Media Sosial Terhadap Demokrasi Generasi Milenial. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 2.

Latifah, K. N., & Najicha, F. U. (2022). Implikasi media sosial terhadap formulasi kebijakan publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 494–501.

Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Nurgiansah, T. H. (2020). *Filsafat Pendidikan*. In Banyumas: CV Pena Persada.

Siregar, H. (2022). Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1, 71–82. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102>

S, W., D, Y. D., & Caecia, G. (2017). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung Dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 300. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i2.494>